

WALI KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM NOMOR 181 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang:

bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Batam Nomor 82 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024;

Mengingat: 1.

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi. Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
- 11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 ((Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
- 12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN WALI KOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Batam.
- 2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.

- 3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
- 4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
- 5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2024, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun berjalan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I. PENDAHULUAN;
 - b. BAB II. HASIL EVALUASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II;
 - c. BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV. PENUTUP.
- (3) Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan bagian dari Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target capaian kinerja, dan pagu indikatif.
- (2) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.
- (3) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

> Ditetapkan di Batam pada tanggal 5 Aastus 2014

WALI KOTA BATAM

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam pada tanggal 5 Aburu 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

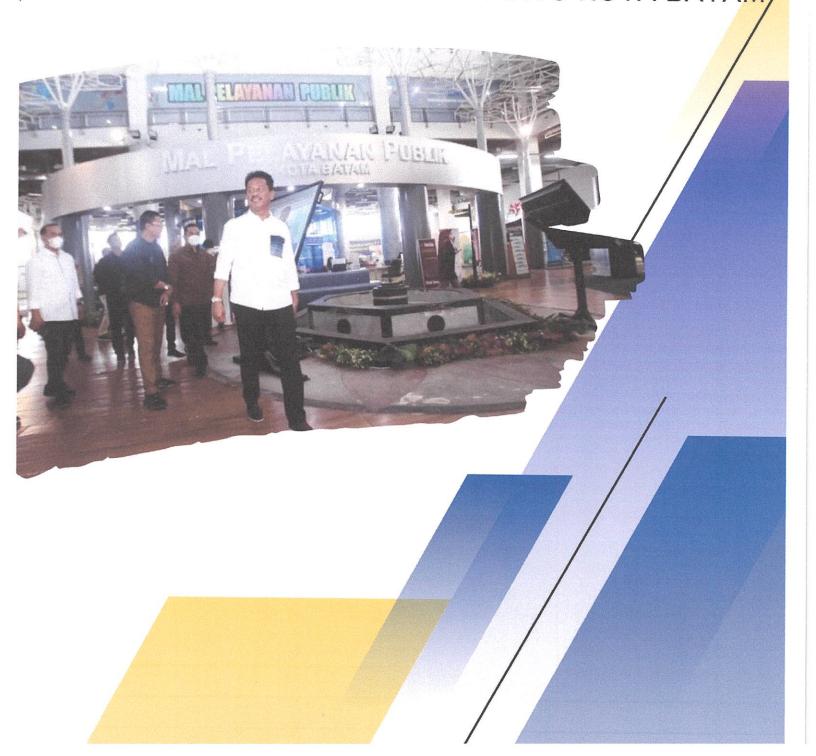
JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR**152**1



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam TA. 2024 dapat disusun sesuai amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana daerah diwajibkan menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah baik rencana tahunan RKPD maupun dokumen rencana jangka menengah lima tahunan (RPJMD) dan jangka panjang (RPJPD).

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kota Batam Tahun 2024 disusun mengacu dan konsisten dengan prioritas, tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah sebagaimana dalam rancangan Renstra DPMPTSP Kota Batam periode 2021-2026. Tatkala penting yang menjadi fokus penyusunannya agar selaras dengan tugas fungsi Dinas serta program prioritas Kepala Daerah terhadap pembangunan daerah Kota Batam.

Dalam dokumen perencanaan, Renja PD merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen Renstra Dinas untuk dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya dan melaporkan realisasi capaian kinerja pada akhir tahun pelaksanaannya demi tercapaianya tujuan dan sasaran organisasi.

Batam, 12 Juli 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA

PMREZA KHADAFY.S.STP.,MPA.

Pembina Tingkat I / IVb

NIP 1980061919999121002

Daftar Isi

Kata Peng	gantar3
BAB I. Pe	ndahuluan4
I.1 Latar	Belakang4
I.2 Land	asan Hukum5
I.3 Maks	ud dan Tujuan6
I.4 Sister	matika Penulisan6
BAB II	8
EVALUAS	I RENJA PERANGKAT SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 20248
2.1. II (Tahı	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan Triwulan un Berjalan)8
2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah22
2.3. Daerah	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat 2525
2.3.1	Tingkat Kinerja Perangkat Daerah25
2.3.2	Permasalahan dan Hambatan25
2.3.3	Peluang dan Tantangan
2.3.4	Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan PD28
BAB III	41
RENCANA	KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH41
3.1. Telaal	han Terhadap Kebijakan Nasional41
3.2. Tujua	n dan Sasaran Renja Perangkat Daerah42
3.3. Progra	am dan Kegiatan43
BAB IV. P	ENUTUP58
4.1. Catata	an Penting58
4.2. Kaida	h Pelaksanaan58
4.3. Renca	ına Tindaklanjut59

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun
Berjalan Sampai dengan Triwulan II8
Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai
Dengan Tahun 2023 Kota Batam15
Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DPMPTSP
Kota Batam24
Tabel 3.2.1 Tujuan DPMPTSP Kota Batam42
Tabel 3.2.2 Sasaran DPMPTSP Kota Batam43
Tabel 3.2.3 Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kota Batam43
Tabel 3.2.4 Penjabaran Pelaksanaan Pada DPMPTSP Kota Batam44
Tabel 3.2.5 Kegiatan Prioritas DPMPTSP Kota Batam sesuai dengan janji
Walikota dan Wakilwalikota terpilih44
Tabel 3.2.6 Tujuan DPMPTSP Kota Batam sesuai dengan TPB/SDG46
Tabel 3.2.7 Sasaran dan Program/Kegiatan/Subkegiatan DPMPTSP Kota
Batam48
Tabel T-C.32 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu
pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Berjalan
DPMPTSP Kota Batam51

BAB I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah di tahun 2024 yang merupakan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam. Dengan usulan perubahan anggaran pada program, kegiatan dan sub kegiatan, serta adanya penambahan sub kegiatan yang dipandang perlu untuk dilaksanakan sebagai kegiatan prioritas di tahun 2024.

Usulan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam disertai analisis dan kajian sebagai berikut :

- Adanya tuntutan kebutuhan sumber daya personil dengan tugas fungsi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dalam penyelenggaraan tugas pengawasan operasional penerbitan izin berusaha;
- b. Anggaran perubahan gaji dan tambahan penghasilan pegawai dikarenakan mutasi pegawai (PNS) dan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- c. Tingkat kebutuhan anggaran perjalanan dinas dalam mengikuti undangan K/L dan koordinasi lintas daerah;
- d. Pengurangan anggaran di sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dikarenakan tenaga harian lepas (THL) lulus PPPK.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja disusun sesuai dengan Permendagri RI Nomor 86 Tahun 2017, dan Pasal 5 dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, yang disertai indikator kinerja dan pendanaan, berpedoman dengan Renstra PD dan RKPD sesuai dengan tugas fungsi DPMPTSP Kota Batam berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Batam.

Sesuai Peraturan Daerah tersebut kedudukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Batam.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam sesuai dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 28 tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan uraian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

I.2 Landasan Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
- 11.Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 13. Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
- 14.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021;
- 15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 16.Peraturan Walikota Batam Nomor 78 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- 17. Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 18. Peraturan Walikota Batam RKPD tahun 2025; Peraturan Walikota Batam Nomor 83 Tahun 2024, Tanggal 4 Juli 2024 (Berita Daerah Nomor 1423)
- 19. Peraturan Walikota RKPD Perubahan 2024; Nomor 84 Tahun 2024, Tanggal 11 Juli 2024 (Berita Daerah Nomor 1424)

I.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja ini adalah menyelaraskan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan perubahan target kinerja, sumber dan anggaran yang dibutuhkan di tahun 2024.

Tujuan disusunnya Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja SKPD adalah untuk mensinergikan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam tahun 2024 dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perubahan perencanaan daerah (Perubahan RKPD) Tahun 2024.

I.4 Sistematika Penulisan

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan Triwulan II (Tahun Berjalan)

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dirancangkan sesuai dengan hasil evaluasi Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang telah berjalan sampai dengan triwulan II. Usulan perubahan yang disusun oleh Dinas berdasarkan kebutuhan prioritas yang telah dianalisis dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD sampai dengan triwulan II disampaikan melalui realisasi fisik dan keuangan, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan dalam dokumen Pengukuran Kinerja dinas yang diperjanjikan di tahun 2024, dan evaluasi rencana kerja yang dilaksanakan per triwulan oleh Bapelitbangda.

Evaluasi Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kota Batam diukur melalui capaian 2 (dua) sasaran organisasi yakni, Sasaran 1) Meningkatnya realisasi investasi, dengan target indikator kinerja Realisasi Investasi (Rp4 T), capaian realisasi sampai dengan triwulan II yakni Rp5.943.182.730 dan; 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang perizinan, dengan target indikator kinerja 1)Dokumen ISO 9001, capaian realisasi sampai dengan triwulan II masih dalam proses pelaksanaan paket pekerjaan yang akan disusun oleh tenaga ahli, rencana pelaksanaan disusun di triwulan II; 2)Persentase Penurunan Pengaduan Layanan oleh Masyarakat (5%), capaian realisasi sampai dengan triwulan II 0%.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Berjalan sampai dengan triwulan II

		K	Code		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renja Tahun Berjalan)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
		_	1		2	3	4	5	6 = 5/4*100
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			¥	
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			14.694.058.656	
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		13.344.019.068	
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi	100%	5.180.914.476	16,79 %
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	532 OB	5.180.914.476	54,81 %
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum PD	90%	235.352.251	28,91 %
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 Paket	5.225.000	90,87 %
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	32 Paket	139.475.000	85,47 %
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Paket	18.280.000	93,91 %
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	600.000	33,33 %
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94 Laporan	71.772.251	34,86 %

2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan PD yang terpenuhi	100%	901.420.894	21,07 %
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	24 Laporan	409.124.708	45,41 %
2	18	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Laporan	26.550.000	36,88 %
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	416 Laporan	465.746.186	41,05 %
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100%	190.356.900	7,17 %
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangar	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 Unit	96.090.900	44,03 %
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	13 Unit	27.030.000	35,77 %
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	67.236.000	21,22 %
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase izin investasi yang ditindaklanjuti	5%	87.240.000	30,66 %
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang memperoleh insentif	8%	87.240.000	30,66 %
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	87.240.000	30,66 %
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase kepeminatan investasi	95%	204.474.380	4,83 %
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan promosi yang dilaksanakan	64%	204.474.380	4,83 %

2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	204.474.380	60,26 %
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penyelesaian perizinan sesuai waktu SOP	90%	5.650.000	0 %
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat ketepatan waktu responsive berjalannya proses perizinan, konsultasi, dan pengaduan	90%	5.650.000	
2	18	04	2.01	08	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	100 Kegiatan Usaha	5.650.000	51,36 %
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Tingkat Kepatuhan perusahaan dalam menyampaikan LKPM	10%	57.839.400	0 %
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM tepat waktu	10%	57.839.400	0 %
2	18	05	2.01	05	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mengikuti Bimbingan Teknis / Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	200 Pelaku Usaha	50.139.400	8,48 %
2	18	05	2.01	06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku, dilakukan inspeksi Lapangan serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	120 Kegiatan Usaha	7.700.000	13,79 %
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan data investasi secara realtime	80%	85.600.000	
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Frekuensi pembaruan data investasi yang disajikan; evaluasi pengembangan sistem	4 Kali	85.600.000	
2	18	06	2.01	02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan	3000 Dokumen	85.600.000	94, 59 %

Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan	Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah Dikaji dan	
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dimanfaatkan	

Selanjutnya realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2024 DPMPTSP Kota Batam dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp13.096.346.056 melaksanakan 4 (empat) kegiatan yaitu:
 - 1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp9.982.065.096, outcome kinerja yakni: Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi dengan target kinerja (100%), dimana rumus penghitungan outcome kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah ditetapkan, dilaksanakan 1 sub kegiatan dengan realisasi output per 31 Mei 276 Orang/Bulan PNS yang telah menerima gaji dan tambahan penghasilan PNS;
 - 2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp396.065.000, outcome kinerja kegiatan ini adalah Persentase Penyediaan Administrasi Umum PD dengan target kinerja (100%), dimana rumus penghitungan outcome kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah ditetapkan (5 sub kegiatan yang dilaksanakan dibagi dengan 5 sub kegiatan yang tersedia dikali 100);
 - 3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp2.107.518.960 memiliki outcome yaitu: Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan PD yang Terpenuhi dengan target kinerja (100%), dimana rumus penghitungan outcome kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah ditetapkan (3 sub kegiatan yang dilaksanakan dibagi dengan 3 sub kegiatan yang tersedia dikali 100);
 - 4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp610.697.000, outcome kinerja yakni: Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Layak Fungsi dengan target kinerja (100%), dimana rumus penghitungan outcome kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah ditetapkan (3 sub kegiatan yang dilaksanakan dibagi dengan 3 sub kegiatan yang tersedia dikali 100);

- II. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp284.530.000 melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Rp284.530.000, outcome kegiatan ini yakni: Persentase Dokumen Perencanaan Penanaman Modal yang Dipenuhi dengan target kinerja (45%), dimana rumus penghitungan outcome kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah ditetapkan (jumlah dokumen yang disusun dibagi dengan jumlah dokumen yang seharusnya disusun);
- III. Program Promosi Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp399.300.000 melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Rp399.300.000, outcome kegiatan ini yakni: Persentase Kegiatan Promosi yang Dilaksanakan dengan target kinerja (90%), dimana rumus penghitungan outcome kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah ditetapkan (jumlah kegiatan yang dilaksanakan dibagi dengan kegiatan yang seharusnya dilaksanakan).
- IV. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp166.852.000 melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Rp166.852.000, outcome kegiatan ini yakni: Tingkat Ketepatan Waktu Responsif Berjalannya Proses Perizinan, Konsultasi, dan Pengaduan dengan target kinerja (90%), dimana rumus penghitungan outcome kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah ditetapkan (jumlah izin terbit sesuai SOP dibagi jumlah seluruh izin terbit).
- V. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp647.426.316 melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Rp647.426.316, outcome kegiatan ini yakni: Tingkat Kepatuhan Perusahaan dalam menyampaikan LKPM dengan target kinerja (10%), dimana rumus penghitungan outcome kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah ditetapkan (jumlah realisasi LKPM dibagi dengan jumlah target).

Sebagaimana dalam penjelasan yang telah diuraikan di atas, secara rinci, dan sekaligus merupakan gambaran realisasi pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2024 dapat dilihat pada tabel T-C.29 di bawah ini:

Tabel T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kota Batam

Tabel T-C.29

									Realisasi Target		an Realisasi I n Kegiatan Ta (2023)		Target Program	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renst Perangkat Daerah s/ Tahun Berjalan	
	K	ode				rusan/Bidang Urusan merintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiat an (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisas i (%)	dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4
2		U	RUSA	AN E	PEME	RINTAHAN WAJIB YANG TI	DAK BERKAITAN DEN	IGAN PELAYANAN DAS	AR						
2	1 8		U	RUS	SAN P	EMERINTAHAN BIDANG PE	NANAMAN MODAL								
2	1 8	0		S. 1100 (2)		AM PENUNJANG URUSAN UNTAHAN DAERAH	Persentase kegiatan urusan yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3.441.069.749	100.00
2	1 8	0	2	0 2		giatan Administrasi uangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2.488.803.185	100.00
2	1 8	0	2	0 2		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Gaji	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	532 OB	579 OB	532 OB	579 OB	100%	532 OB	2.475.003.185	100.00
2	1 8	0 1	2	0 2		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	324 Dokumen	276 Dokumen	276 Dokumen	264 Dokumen	100%	324 Dokumen	13.800.000	100.00

2	1 8	0	2	0 5	Ke	giatan Administrasi pegawaian Perangkat erah	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas aparatur yang terpenuhi	25%	0	0	100%	100%	100%	0	100.00
2	1 8	0	2	0 5	0 2	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	45 Stel	0	0	63 Stel	100%	80 Stel	0	100.00
2	1 8	0 1	2	0 5	0 9	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0	0	2 ASN	100%	2 ASN	0	100.00
2	1 8	0	2	0 6		giatan Administrasi Umum rangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum PD	90%	90%	90%	90%	100%	90%	155.655.698	100.00
2	1 8	0	2	0 6	0 1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang disediakan	2 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	2 Paket	3.795.000	100.00
2	1 8	0 1	2	0 6	0 2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	32 Paket	3 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	3 Paket	111.584.700	100.00
2	1 8	0	2	0 6	0 4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	720 Paket	О	0	0	100%	0	0	100.00
2	1 8	0	2	0 6	0 5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Paket	1 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	7 Jenis	19.382.500	100.00
2	1 8	0	2	0 6	0 6	Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	500.000	100.00

2	1 8	0 1	2	0 6	0 9	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94 Kali	52 Laporan	27 Laporan	23 Laporan	100%	27 Laporan	20.333.498	100.00
2	1 8	0 1	2	0 7	Mil	giatan Pengadaan Barang lik Daerah Penunjang usan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan PD yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	100.00
2	1 8	0	2	0 7	0 6	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	93 Unit	9 Jenis	13 Unit	13 Unit	100%	9 Jenis	0	100.00
2	1 8	0	2	0 8	Per	giatan Penyediaan Jasa nunjang Urusan nerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan PD yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	764.930.866	100.00
2	1 8	0	2	0 8	0 2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	100%	24 Jenis	256.321.852	100.00
2	1 8	0	2	0 8	0 3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	24 Jenis	12.000.000	100.00
2	1 8	0	2	0 8	0 4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	416 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	416 Orang Bulan	496.600.014	100.00
2	1 8	0 1	2	0 9	Bai Per	giatan Pemeliharaan rang Milik Daerah nunjang Urusan nerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	31.680.000	100.00

2	1 8	0 1	2	0 9	0 2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 Unit	6 Unit	6 Unit	5 Unit	100%	6 Unit	31.680.000	100.00
2	1 8	0 1	2	0 9	0	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	90 Unit	22 Unit	22 Unit	84 Unit	100%	5 Unit	0	100.00
2	1 8	0	2	0 9	0 9	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	0	100.00
2	1 8	0 2		1,100,000,000,000		AM PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	Tingkat Persentase Izin Investasi yang ditindaklanjuti	Belum Dikerjakan	0	5%	5%	100%	5%	26.000.000	100.00
2	1 8	0 2	2	0 2	Pote	giatan Pembuatan Peta ensi Investasi pupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan penanaman modal yang dipenuhi	Belum Ada Dokumen	o	0	0	100%	45%	26.000.000	100.00
2	1 8	0 2	2	0 2	0 2	Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Belum Ada Dokumen	0	8%	8%	100%	1 Dokumen	26.000.000	100.00
2	1 8	0		1000000		AM PROMOSI MAN MODAL	Persentase tingkat minat investasi	95%	90%	90%	139.9 %	100%	95%	0	100.00
2	1 8	0 3	2	0	Pro	iatan Penyelenggaraan mosi Penanaman modal g menjadi kewenangan rah kabupaten/kota	Jumlah Pengunjung Pameran Penanaman Modal, Rata-rata pengunjung media informasi promosi investasi	78%	200 Pengunjung	200 pengunjung	200 pengunjun g	100%	64%	0	100.00

2	1 8	0 3	2	0 1	0 2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	8 Dokumen	2	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1 Dokumen	DPMPTSP	100.00
2	1 8	0 4				AM PELAYANAN AMAN MODAL	Persentase Penyelesaian perizinan sesuai waktu SOP	99%		90%	88%	100%	90%	0	100.00
2	1 8	0 4	2	0 1	dar Ter Per Me	giatan Pelayanan Perizinan n Nonperizinan Secara rpadu Satu Pintu Dibidang nanaman Modal yang njadi Kewenangan Daerah bupaten/Kota	Tingkat Ketepatan waktu responsif berjalannya proses perizinan konsultasi dan pengaduan	95%		90%	88%	100%	90%	0	100.00
2	1 8	0 4	2	0 1	0 1	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	9000 Pelaku Usaha		3000 Pelaku Usaha	87060 Pelaku Usaha	100%	5000 Pelaku Usaha	0	100.00
2	1 8	0 4	2	0 1	0 7	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan				50 Orang	913 Orang			

2	1 8	0 5		PE		AM PENGENDALIAN SANAAN PENANAMAN	Tingkat Kepatuhan perusahaan dalam menyampaikan LKPM	60%	10%	39.79 %	100%	10%	116.693.420	100.00
2	1 8	0 5	2	0	Pel Mo Key	giatan Pengendalian aksanaan Penanaman dal yang Menjadi wenangan Daerah bupaten/Daerah	Jumlah data investasi yang dikelola	60%	4 Laporan	4 Laporan	100%	10%	116.693.420	100.00
2	1 8	0 5	2	0	0 2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal /Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang Mendapatkan pembinaan pelaksanaan Penanaman modal	1200 Pelaku Usaha	253 Pelaku usaha	536 Pelaku usaha	100%	200 Pelaku Usaha	116.693.420	100.00
2	1 8	0 5	2	0 1	0 3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal/ Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	120 Izin	30 Izin/ SIUP	14	15	120 Izin/SIUP	0	100.00
2	1 8	0 6		DA	N SIS	AM PENGELOLAAN DATA STEM INFORMASI AMAN MODAL	Persentase ketersediaan data investasi secara realtime	60%	60%	70%	100%	0	0	100.00
2	1 8	0 6	2	0 1	dar Nor Ter	giatan Pengelolaan Data n Informasi Perizinan dan n Perizinan yang integrasi pada Tingkat erah Kabupaten/Kota	Frekuensi pembaruan data investasi yang disajikan; Evaluasi pengembangan sistim informasi yang dilaksanakan	4 Kali; 1 Kali	4 Kali	0	0	0	0	100.00
2	1 8	0 6	2	0	0 1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	2100 Izin; 152 Jenis perizinan	5000 Izin	0	o	O	0	100.00

RANHIR PERUBAHAN RENJA 2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam
	Secara Elektronik yang Diolah Dikaji dan Dimanfaatkan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah ukuran kualitafif dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang merupakan unsur utama akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja menjadi dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pada bagian ini diuraikan capaian kinerja utama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam sesuai yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 sebaga berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Realisasi Investasi Indikator Kinerja Utama

I. Kenaikan Realisasi Investasi

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 dan 2024

Target realisasi investasi di tahun 2024 adalah Rp3.000.000.000.000 dan target realisasi pada Penetapan Kinerja Perubahan Dinas sebesar Rp.10.000.000.000.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp15.620.970.368.755.70 Tahun 2024 sampai dengan triwulan II realisasi investasi sebesar Rp5.943.182.730, namun angka realisasi investasi ini terpublikasi pada triwulan I sedangkan triwulan II baru akan dipublikasikan di akhir Juli. Sasaran kinerja dinas di tahun 2024 seperti pada tahun sebelumnya adalah meningkatkan realisasi investasi yang difokuskan melalui kegiatan promosi potensi investasi Batam, menggalakkan terbit Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada pelaku usaha sebanyak-banyaknya hingga pada pelaku usaha UMK yang tahun lalu surplus dengan adanya dukungan dana fiskal sebesar Rp

II. Persentase Penanaman Modal yang menyampaikan LKPM secara regular

Realisasi capaian pada tahun 2022 sebesar 24.41%. Realisasi tersebut melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 10%. Peningkatan realisasi capaian ini dikarenakan fungsi pembinaan dan pengawasan di DPMPTSP Kota Batam telah berjalan dengan sangat optimal.

III. Menurunnya persentase aduan masyarakat terhadap layanan perizinan

Target yang ingin dicapai pada tahun 2022 sebesar 5%, dimana diharapkan adanya penurunan pengaduan layanan oleh masyarakat sebanyak 5%. Realisasi yang dicapai adalah 100%, yang artinya pengaduan layanan oleh masyarakat di DPMPTSP Kota Batam telah 100% memenuhi target.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Perizinan

Indikator Kinerja Utama

- I. Persentase Jenis Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Online Target persentase perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan sesuai waktu SOP di tahun 2022 sebanyak 90% dengan capaian realisasi sebanyak 88%. Namun untuk jumlah perizinan yang diterbitkan melampaui target, dimana untuk jumlah perizinan bidang ekonomi dan sosial yang diterbitkan mencapai 22453 izin dengan target 12000 izin dan jumlah perizinan bidang pembangunan dan lingkungan hidup yang diterbitkan mencapai 289 izin dengan target 280 izin.
- II. Indeks Kepuasan Masyarakat Target yang ingin dicapai pada tahun 2022 adalalah IKM A dan realisasi yang dicapai adalah IKM A dengan nilai 87.83. Maka dapat disimpulkan bahwa kinerja unit Pelayanan berada dalam mutu kategori Sangat Baik.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tabel T-C.30.

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

N o	Indikator	SPM/ Standa	8	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		
		Indikator r Nasion al	Nasion	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	Catatan Analisis
1	Kenaikan Realisasi Investasi			Rp3 T	Rp3 T	Rp4 T	Rp4 T	Rp13.238.639.305.455	Rp. 3,99 T	Rp4 T	Rp4 T	
2	Persentase Penanaman Modal yang menyampaikan LKPM secara Reguler			10%	10%	10%	10%	22.41%	21,41%	10%	10%	
3	Menurunnya Persentase Aduan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan			5%	5%	5%	5%	100%	5%	5%	5%	
4	Persentase Jenis Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Online			90%	90%	90%	90%	88%	94,78%	90%	90%	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat			A	A	A	A	A	А	A	A	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam tahun 2022 yang masuk kategori "Sangat Berhasil" yakni realisasi capaian melebihi target yang ditetapkan adalah:

- a. Indikator Kinerja Realisasi Investasi, di tahun 2022 mencapai Rp.13.238.639.305.455.
- b. Indikator Kinerja Jumlah Perizinan dan Nonperizinan yang Diterbitkan, di tahun 2022 mencapai 22742 Izin meliputi perizinan melalui aplikasi EASY, OSS RBA, dan SIMBG (non berusaha yang belum ada di OSS).

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Secara umum kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam tahun 2022 telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran strategis yang telah ditetapkan. Namun demikian masih terdapat beberapa masalah umum dan permasalahan yang tidak terprediksi yaitu:

- a. Sulit menghubungi dan bertemu penanggungjawab usaha/pelaku usaha pada saat pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- Ketidaksesuaian waktu penyelesaian izin sesuai yang tercantum pada SOP dan SP karena kekurangan personil back office untuk penelitian teknis berkas permohonan izin yang masuk;
- c. Keterlambatan pemohon dalam melakukan pembayaran retribusi bagi jenis perizinan yang dikenai retribusi, yang berakumulasi dengan rentang waktu penyelesaian perizinan sesuai waktu SOP;
- d. Dalam proses pengefektifan izin dengan komitmen masih ada yang dilakukan secara manual dan membutuhkan jenjang alur yang panjang;
- e. Adanya ketidaksesuaian data *scan* yang diinput oleh pemohon, sehingga memperlambat proses verifikasi berkas;
- f. Pelimpahan izin belum dituangkan dalam tugas pokok dan fungsi dan belum dilakukan penyesuaian tupoksi DPMPTSP Kota Batam;
- g. Buku register penerimaan dan penyerahan masih terpisah dan belum menggambarkan tanggal masuk dan tanggal selesai perlu

waktu yang lebih lama untuk melakukan pengecekan jumlah izin terbit tepat waktu.

2.3.3 Peluang dan Tantangan

Permasalahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu merupakan kesejangan antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang, dengan kondisi riil saat perencanaan disusun. Potensi permasalahan pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Perumusan permasalahan pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu akan mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu di tahun sebelumnya, agar dilakukan dengan menganalisis lingkungan internal dan eksternal. Permasalahan pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu dian pelayanan perizinan terpadu dan pelayanan perizinan terpadu dan pelayanan penanaman modal

I. Faktor Internal

Faktor internal yang bersumber dari dalam organisasi dan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Faktor internal tersebut dapat berupa kekuatan (*strenghts*) dan berupa kelemahan (*weaknesses*).

1. Kekuatan (Strengths)

Isu strategis ini merupakan faktor pendukung dan pemacu dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja OPD, dan faktor kekuatan yang dimiliki DPMPTSP Kota Batam adalah:

- a. Letak geografis yang strategis;
- b. Bangunan gedung yang cukum memadai;
- c. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal;
- d. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) sebagai panduan dalam melaksanakan mekanisme pelayanan perizinan dan nonperizinan serta penanaman modal;
- e. Peraturan dan Perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan penanaman modal dan PTSP.

2. Kelemahan (Weaknesses)

Isu strategis yang merupakan kelemahan yang menjadi kendala/penghambat dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Disiplin dan kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masih rendah;
- Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsi urusan penanaman modal dan sub urusan PTSP;
 - Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan dalam mendukung kinerja pelayanan publik;
- c. Terbatasnya () yang dialokasikan dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

II. Faktor Eksternal

Selain faktor internal, isu strategis faktor eksternal juga berpengaruh terhadap kinerja pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam. Identifikasi faktor eksternal ada yang berupa peluang (Opportunities) dan ada yang berupa ancaman (Threats). Faktor eksternal yang menjadi peluang (Opportunities) adalah sebagai berikut:

1. Peluang (Opportunities)

Isu strategis ini merupakan isu strategis yang berasal dari luar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memberikan dorongan/dukungan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Dinas. Beberapa isu strategis yang menjadi faktor peluang (opportunities) DPMPTSP Kota Batam adalah:

- a. Pelaksanaan otonomi daerah, memberikan kewenangan kepada daerah dalam meningkatkan pelayanan publik termasuk dunia usaha secara professional;
- b. Penerapan pelayanan perizinan berbasis teknologi informasi melalui aplikasi OSS RBA (Risk Based Approach);
- c. Minat pelaku usaha dalam berinvestasi di Kota Batam semakin tinggi;
- d. Iklim investasi di daerah yang kondusif;
- e. Merupakan daerah industri yang memiliki zona KEK dalam rangka memberikan banyak kemudahan dan insentif bagi investor yang menanam modalnya di zona KEK;

- f. Pertumbuhan UMKM di Kota Batam yang mampu menyerap tenaga kerja;
- g. Penyediaan data potensi dan peluang investasi yang merupakan modal pelaksanaan promosi secara optimal dan tepat sasaran;
- h. Tersedianya tempat dan *event* pameran skala nasional dalam rangka promosi peluang investasi Kota Batam.

2. Ancaman (Threats)

Isu strategis faktor eksternal yang menjadi Ancaman (*threats*) terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kinerja OPD yang merupakan kendala maupun penghambat adalah sebagai berikut:

- a. Regulasi yang terus mengalami perubahan yang berdampak pada pelaksanaannya di lapangan;
- Rendahnya antusias masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap survey kepuasan masyarakat untuk meningkatkan mutu pelayanan publik;
- Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam mengurus perizinan dan nonperizinan dan melaporkan pelaksnaan kegiatan usahanya;

2.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan PD

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka upaya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dalam mengantisipasi dan meminimalisasi permasalahan yang ada untuk meningkatkan kinerja Dinas di tahun berikutnya antara lain:

- Melakukan koordinasi dengan OPD terkait untuk penyusunan data potensi peluang investasi daerah, secara khusus di 12 (dua belas) Kecamatan;
- Melakukan pembinaan dan konsultasi, fasilitasi dan evaluasi terhadap pelaksana penatausahaan keuangan, mulai dari Bendahara pengeluaran, PPTK, KPA dan PPK dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh Dinas;
- 3. Berproses membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi, Bersih dan Melayani (WBBM);

- 4. Melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penanaman modal dan sistem perizinan berusaha berbasis risiko;
- 5. Inovasi layanan yang mendukung dan meningkatkan mutu/kualitas pelayanan publik bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan, melalui optimalisasi penerapan OSS RBA (*Risk Based Approach*);
- 6. Pengawasan pelaksanaan penanaman modal, melalui inspeksi lapangan dilakukan secara rutin berdasarkan tingkat risiko dan tingkat kepatuhan pelaku usaha;
- 7. Pemantauan dan Pembinaan terhadap pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran dan mendampingi pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM;
- 8. Menyajikan data, profil dan informasi pelaku usaha yang terdapat pada sistem OSS;
- 9. Melakukan koordinasi dengan BKPM, DPMPTSP Provinsi, Administrasi KEK dan Badan Pengusahaan KPBPB terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan dan pengawasan;
- 10. Melakukan evaluasi SOP dan SP untuk memantau efektifitas pelaksanaan SOP dan SP terhadap adanya perubahan peraturan-peraturan terkait pelayanan perizinan;

Berkaitan dengan formulasi isu-isu penting di atas, maka upaya perbaikan perbaikan telah dilakukan pada poin 1, 2, dan 3 sebagai berikut:

- 1. Menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) daerah di Renja tahun 2024;
- 2. Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana yakni kendaraan dinas operasional, komputer, printer, scanner dan lemari arsip;
- 3. Membentuk Tim Zona Integritas DPMPTSP Kota Batam dan menyusun rencana kerja pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
- 4. Mengikuti bimbingan teknis mengenai system perizinan berusaha berbasis risiko yang diselenggarakan oleh BKPM;

2.1. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel T-C.31. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Batam

		R	ANCANGAN AWAL RKP	D		HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
N o	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Batam	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	15,872,985,516	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Batam	Persentase kegiatan urusan yang terpenuhi	100%	18.608.033.620		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Batam	Persentase dokumen perencanaan dan monitoring anggaran yang dilaksanakan	100%	140,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Batam	Persentase dokumen perencanaan dan monitoring anggaran yang dilaksanakan	100%	16.931.480.032	Ada perubah an	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Batam	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokume n	70,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Batam	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokume n	65.000.000		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Batam	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	70,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Batam	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	65.000.000		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Batam	Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi	100 %	11,780,119,416	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Batam	Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi	100%	10.264.175.077		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Gaji	Batam	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	532 OB	11,688,889,416	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Gaji	Batam	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	532 OB	10.208.475.077		

RANHIR PERUBAHAN RENJA 2024

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Batam	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	324 Kegiata n	91,230,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Batam	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	324 Dokume n	55,700,000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Batam	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas aparatur yang terpenuhi	100%	90,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Batam	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas aparatur yang terpenuhi	100%	180.452.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Batam	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 ASN	90,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Batam	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	180.452.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Batam	Persentase penyediaan administrasi umum PD	90%	678,832,500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Batam	Persentase penyediaan administrasi umum PD	90%	569.043.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Batam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 Paket	3,150,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Batam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	9.192.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	32 Paket	142,323,500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	32 Paket	203.240.000	

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	660 Paket	84,084,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	660 Paket	22.440.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Batam	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Paket	32,750,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Batam	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	20.289.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Batam	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	12 Dokume n	1,800,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Batam	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Dokume n	1,800,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94 Kali	498,809,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94 Laporan	312.082.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Batam	Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan PD yang terpenuhi	100%	300,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Batam	Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan PD yang terpenuhi	100%	2.467.501.395	
Pengadaan Mebel	Batam	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	0	0	Pengadaan Mebel	Batam	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 Paket	6.921.000	

d P K	Pengadaan Sarana lan Prasarana Pedukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Batam	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang diadakan	0	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pedukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Batam	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	830.141.395	
P	Pengadaan Peralatan dan Mesin ainnya	Batam	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	20 Unit	300,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	1.630.439.000	
Pe	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan PD yang terpenuhi	100%	2,654,033,600	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan PD yang terpenuhi	100%	2.254.052.560	
K	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Batam	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 Laporan	1,005,033,600	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	901,038,000	
Pe Pe	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	36,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Batam	Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Laporan	72,000,000	
Pe	enyediaan Jasa elayanan Umum antor	Batam	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	416 Laporan	1,613,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	416 Laporan	1.281.014.500	

RANHIR PERUBAHAN RENJA 2024

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Batam	Tingkat Persentase Izin Investasi yang ditindaklanjuti	5%	118,905,935	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Batam	Persentase Izin Investasi yang ditindaklanjuti	5%	499,173.000
Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Batam	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabili tasi	1 Unit	70,000,000	Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Batam	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi	1 Unit	748.476.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	90 Unit	65,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	90 Unit	99.550.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Batam	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 Unit	95,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Batam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	218,230,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100%	230,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100%	1.066.256.000

Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Persentase kegiatan promosi yang dilaksanakan	64%	331,519,388	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Persentase kegiatan promosi yang dilaksanakan	64%	339.300.000	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Batam	Persentase Kepeminatan Investasi	95%	331,519,388	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Batam	Persentase Kepeminatan Investasi	95%	339.300.000	
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Batam	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokume n	118,905,935	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Batam	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokume n	214.643.000	
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Batam	Persentase dokumen perencanaan penanaman modal yang dipenuhi	50%	118,905,935	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Batam	Persentase dokumen perencanaan penanaman modal yang dipenuhi	50%	214.643.000	
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Batam	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0	0	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Batam	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokume n	284.530.000	
Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Persentase Pelaku usaha yang memperoleh insentif	0	0	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Persentase Pelaku usaha yang memperoleh insentif	8%	284.510.000	

		T								
Penyusunan strategi promosi penanaman modal	Batam	Jumlah Peraturan Daerah Yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokume n	81,519,388	Penyusunan strategi promosi penanaman modal	Batam	Jumlah Peraturan Daerah Yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	
Pelaksanaan Kegiatan promosi penanaman modal	Batam	Terlaksananya kegiatan promosi potensi investasi daerah	2 Dokume n	250,000,000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokume n	339.300.000	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Batam	Persentase Penyelesaian perizinan sesuai waktu SOP	90%	23,013,119	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Batam	Persentase Penyelesaian perizinan sesuai waktu SOP	90%	278.723.000	
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Batam	Tingkat ketepatan waktu responsif berjalannya proses perizinan, konsultasi, dan pengaduan	90%	23,013,119	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/	Batam	Tingkat ketepatan waktu responsif berjalannya proses perizinan, konsultasi, dan pengaduan	90%	278.723.000	
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Batam	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5000 Pelaku Usaha	23,013,119	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Batam	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5000 Pelaku USaha	113.650.000	

Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Batam	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	0	0	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Batam	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	100 Kegiata n Usaha	11.000.000	
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Batam	Jumlah Orang yang Memperoleh Pelayanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	0	0	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Batam	Jumlah Orang yang Memperoleh Pelayanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	240 Orang	154.073.000	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Batam	Tingkat Kepatuhan perusahaan dalam menyampaikan LKPM	10%	342,567,785	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Batam	Tingkat Kepatuhan perusahaan dalam menyampaikan LKPM	10%	468.857.588	
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM tepat waktu	10%	342,567,785	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM tepat waktu	10%	468.857.588	

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Batam	Persentase ketersediaan data investasi secara realtime	80%	92,660,931	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Batam	Pengawasan Persentase ketersediaan data investasi	80%	90.500.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Batam	Jumlah Kegiatan Usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan Sinkronisasi	120 Izin/SIU P	130,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Batam	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi	120 Kegiata n Usaha	23,850,000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Batam	Jumlah pelaku usaha yang Mendapatkan pembinaan pelaksanaan Penanaman modal	200 Pelaku Usaha	82,567,785	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Batam	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	200 Pelaku Usaha	445.007.588	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Batam	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi	700 Pelaku Usaha	130,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Batam	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi	0	0	

RANHIR PERUBAHAN RENJA 2024

Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Frekuensi pembaruan data investasi yang disajikan; evaluasi pengembangan sistem informasi perizinan yang dilaksanakan	4 Kali	92,660,931	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Frekuensi pembaruan data investasi yang disajikan; evaluasi pengembangan sistem informasi perizinan yang dilaksanakan	4 Kali	90.500.000	
Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Batam	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah Dikaji dan Dimanfaatkan	3000 Data	92,660,931	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Batam	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3000 Dokume n	90.500.000	

2.2. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam hal pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam tidak ada usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, organisasi masyarakat dan perguruan tinggi.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam sebagai Dinas teknis yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar di bidang penanaman modal dan sub urusan pelayanan terpadu satu pintu. Selain itu juga menyelaraskan dengan visi dan misi Kepala Daerah. Dalam tahun peralihan antara RPJMD Kota Batam periode 2016-2021 dan RPJMD Kota Batam periode 2021-2026, maka Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam berperan aktif agar pembangunan daerah Kota Batam dapat mencapai target tujuan RPJMD Kota Batam dan lebih dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Kota Batam.

Dalam kesempatan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam mendukung Visi Kepala Daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan yakni "Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia yang Madani, Modern dan Sejahtera" yang dijabarkan kedalam 5 (lima) misi dimana DPMPTSP Kota Batam melaksanakan 2 misi yaitu misi 1 (kesatu) yaitu "Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadlian melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah" dan misi 5 (kelima) "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat".

Penetapan kebijakan penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam disusun mengacu kepada kebijakan Pemerintah Kota Batam dan kebijakan nasional yaitu program skala prioritas nasional. Untuk menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut yang telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah sebagai berikut.

 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pelayanan Penanaman Modal, dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan indikator kinerja diarahkan untuk Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Perizinan;

 Program wajib yaitu urusan Penanaman Modal dengan indikator kinerja yaitu Meningkatnya Realisasi Investasi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan penyelenggaraan pembangunan di bidang penanaman modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dalam rangka mencapai tujuan RPJMD yaitu "Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah" dan "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dibidang pelayanan Satu Atap" melalui tujuan yaitu:

- Meningkatnya Realisasi Investasi dan Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Perizinan

Tabel. 3.2.1 Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

		Hota Batain	
No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target Kinerja Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2024
1	Meningkatnya realisasi investasi Kota Batam dan kualitas pelayanan publik dibidang perizinan	Pertumbuhan realisasi investasi daerah	10%
2		Indeks kepuasan masyarakat (IKM) dibidang pelayanan perizinan satu atap	IKM A

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam adalah "Meningkatnya realisasi investasi dan Meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang perizinan" melalui :

- a. Realisasi Investasi;
- b. Sertifikasi ISO Pelayanan Publik dan Persentase penurunan pengaduan layanan oleh masyarakat.

Tabel. 3.2.2

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024
1	Meningkatnya realisasi investasi	Realiasi Investasi	Rp4.000.000.000.000
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang perizinan	Sertifikasi ISO Pelayanan Publik Persentase penurunan pengaduan layanan oleh masyarakat	Tersertifikasi ISO 9001 5%

Tabel. 3.2.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

	Batan	
No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)
1	Kenaikan Realisasi Investasi	10%
2	Persentase Penanaman Modal yang menyampaikan LKPM secara reguler	10%
3	Menurunnya persentase aduan masyarakat terhadap layanan perizinan	5%
4	Persentase Jenis Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Online	90%
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM A

3.3. Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan dan kegiatan

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Berdasarkan visi kepala daerah Kota Batam tahun 2021-2026, Pemerintah Kota Batam mempunyai Visi "Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera". Guna mewujudkan Visi Kota Batam ditetapkan misi beserta tujuan dan sasaran pembangunan untuk 5 (lima) tahunan. Tujuan dan sasaran pembangunan pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan Pemerintah Daerah. Penjabaran pelaksanaan pada DPMPTSP adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.2.4 Penjabaran Pelaksanaan pada DPMPTSP

Misi 1: Mewujudkan Pertumbu	han Ekonomi yang Berkeadilan
Melalui Peningkatan kualita	s dan diversifikasi kegiatan
perekonomian berbasis keunik	an dan keunggulan wilayah
1.1. Meningkatkan	1.1.3. Meningkatnya Realisasi
Perekonomian Kota	Investasi Kota Batam
Batam Berbasis Sektor	
perindustrian,	
perdagangan, jasa, dan	
pariwisata yang	
berdaya saing	
Misi 5: Mewujudkan Tata Ke	elola Pemerintahan Yang Baik,
Responsif, Efektif Dan Efisier	n Berbasis Teknologi Informasi
Dalam Meningkatkan Pelayana	an Kepada Masyarakat
5.1 Mewujudkan	5.1.3. Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan	pelayanan publik yang
pemerintahan yang	transparan dan akuntabel
profesional, akuntabel,	dengan memanfaatkan
transparan dan	teknologi informasi
mengayomi	

Berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi yang telah ditentukan, selanjutnya guna dapat implementasikan dalam mencapai sasaran pembangunan Kota Batam, maka strategi pembangunan tersebut dapat dilaksanakan dalam program pembangunan daerah.

Berikut kegiatan prioritas untuk DPMPTSP sesuai dengan janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yang disinkronkan dengan program pembangunan daerah:

Tabel. 3.2.5 Kegiatan Prioritas DPMPTSP sesuai dengan janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih

Program Pr	Program Prioritas		giatan Unggulam	Program		
				Pembangunan		
Peningkata	n dan	I.	Meningkatkan	Program	Promosi	
Fasilitasi	Fasilitasi		koordinasi	Penanama	an Modal	
Investasi Berbasis			dengan			
Maritim dan			pemerintah			

Keunggulan	pusat, Provinsi,	
Wilayah	BP Batam, dan	
	dunia usaha	
	dalam rangka	
	memberikan	
	kemudahan	
	fasilitas investasi	
	dan Promosi.	
	II. Meningkatkan	Program Pelayanan
	dan	Penanaman Modal
	memperkuat	
	kinerja	
	pelayanan	
	perizinan	
	melalui	
	penguatan SDM	
	dan Teknologi	
	Informasi.	
	III. Memberikan	Program
	insentif dan	Pengembangan
	kemudahan	Iklim Penanaman
	berusaha	Modal
	sebagai	Program Promosi
	stimulus	Penanaman Modal
	ekonomi bagi	
	pelaku usaha.	
	IV. Menciptakan	
	kenyamanan	
	dan kepastian	
	investasi	
	melalui	
	fasilitasi sarana	
	pendukung	
	investasi di	
	bidang lahan,	
	infrastruktur	
	dasar dan	

utilitas serta	
dukungan	
aspek legal.	

2. Pencapaian SDGs

Dalam rangka menyelaraskan program pembangunan jangka menengah Kota Batam tahun 2021-2026 dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs), maka Pemerintah Kota Batam berkomitmen untuk mendukung menetapkan arah kebijakan yang secara konkrit dilaksanakan melalui program prioritas pembangunan. Pencapaian TPB/SDG's langsung diterapkan pada sejumlah program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan pilar TPB/SDGs.

Adapun program prioritas pembangunan dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goal (TPB/SDG's) adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel. 3.2.6
Tujuan DPMPTSP sesuai dengan TPB/SDG

Tujuan	Program Pembangunan dalam				
	RPJMD				
Pilar Pem	bangunan Ekonomi				
Tujuan 8: Pekerjaan	Program Pengembangan Iklim				
Layak dan Pertumbuhan	Penanaman Modal				
Ekonomi	Program Promosi Penanaman				
	Modal				
	Program Pelayanan Penanaman				
	Modal				
	Program Pengendalian				
	Pelaksanaan Penanaman Modal				

3. Pencapaian Program Skala Prioritas Nasional

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan target yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan yang akuntabel, dapat dipertanggunjgawabkan dan berkinerja tinggi. Dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 5/2021, PP Nomor 6/2021 dan PP Nomor 9/2021, dimana PTSP

sedang didorong untuk memberikan layanan perizinan yang cepat, tepat dan mudah bagi pelaku usaha dan memberikan kepastian dalam pemberian layanan, sehingga tercipta iklim investasi yang melayani dan meningkatkan realisasi investasi di daerah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan nasional. Implementasi penggunaan aplikasi OSS RBA segera dioptimalkan dalam proses permohonan perizinan dan penanaman modal di daerah.

4. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Untuk memperkenalkan potensi investasi di Kota Batam disemua sector perlu adanya promosi yang dilakukan baik keikutsertaan dalam pameran dan sejenisnya di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Program yang mendukung antara lain adalah Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Program Promosi Penanaman Modal. Diharapkan dengan pelaksanaan promosi secara optimal melalui berbagai media yang ada maka akan dapat meningkatkan nilai investasi di Kota Batam.

5. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam adalah Meningkatnya realisasi investasi Kota Batam sebesar 10%, dan Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan pencapaian nilai IKM A. untuk mencapai target ini perlu dirumuskan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung peningkatan realisasi investasi disetiap tahunnya yaitu dengan Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, dan Program Pengendalian Penanaman Modal, sedangkan untuk mencapai nilai IKM A dibidang pelayanan perizinan maka dirumuskan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung yaitu Program Pelayanan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data dan Sistim Informasi Penanaman Modal.

Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

- Jumlah program dan jumlah kegiatan

Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan diarahkan untuk mencapai visi misi diatas maka, Renja DPMPTSP Tahun 2024

terdapat 5 program wajib dan 1 program penunjang, 6 kegiatan wajib dan 7 kegiatan penunjang serta 10 sub kegiatan wajib dan 21 sub kegiatan penunjang, sehingga total 31 sub kegiatan.

Tabel. 3.2.7. Sasaran dan Program/Kegjatan/Sub Kegjatan

	Sasaran dan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
No	Sasaran	Program/Kegiatan/Su Kegiatan
	Perangkat	
	Daerah	
1	Meningkatnya	Program Pengembangan Iklim
	realisasi	Penanaman Modal
	investasi	Kegiatan Penetapan Pemberian
		Fasilitas/Insentif dibidang
		Penanaman Modal yang menjadi
		Kewenangan Daerah
W7		Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan
		Pemberian Fasilitas/Insentif dan
		Kemudahan Penanaman Modal
*-		Kegiatan Pembuatan Peta Potensi
		Investasi Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi
		dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
		Program Promosi Penanaman Modal
		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi
		Penanaman Modal yang Menjadi
		Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah
		Kabupaten/ Kota
		Program Pengendalian Pelaksanaan
		Penanaman Modal
		Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan
		Penanaman Modal yang Menjadi
		Kewenangan Daerah Kabupaten/
		Kota
		Sub Kegiatan Koordinasi dan
		Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan
		Penanaman Modal
		Sub Kegiatan Koordinasi dan
		Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan
		Penanaman Modal
2	Meningkatnya	Program Penunjang Urusan
	kualitas	Pemerintahan Daerah
	pelayanan	Kabupaten/Kota
	publik	Kegiatan Perencanaan,
	dibidang	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
	perizinan	Perangkat Daerah
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen
		Perencanaan Perangkat Daerah
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja
		Perangkat Daerah
		Kegiatan Administrasi Keuangan
		Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN
Sub Kegiatan Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas
dan Fungsi
Kegiatan Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan
Logistik
Sub Kegiatan Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan konsultasi SKPD
Kegiatan Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan
dan Mesin Lainnya
Kegiatan Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan
Logistik Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya
Sub Kegiatan Pemeliharaan/
Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

	Program Pelayanan Penanaman Modal
	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistim Pelayanan Perizinn Berusahan Terintegrasi Secara Elektronik
	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu
26	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperiiznan yang Terintegrasi pada
	Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi
	Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusahan Terintegrasi secara Elektronik

Tabel Rencana Program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan pada tabel T-C.32

Tabel T-C 32 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencanana Kerja (Renja) Tahun Berjalan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

Kode	PROGRAM / KEGIAT.		INDIKATOR PROGRAM (OUTPUT)/SUBKEGI	(OUTCOME) / KEGIATAN ATAN (SUB OUTPUT)	TAR	GET		PAGU		Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	14.624,954.372	15.147.736.080	522.781.708	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi	Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi	100 %	100 %	9.982.065.096	10.405.005.284	422.940.188	
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	840 Orang/bulan	840 Orang/bul an	9.982.065.096	10.405.005.284	422.940.188	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas aparatur yang terpenuhi	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas aparatur yang terpenuhi	100 %	100 %	0	31.414.000	31.414.000	

2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 ASN	3 ASN	0	31.414.000	31.414.000	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum PD	Persentase penyediaan administrasi umum PD	90 %	90 %	396.065.000	503.847.000	107.782.000	
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 Paket	2 Paket	5.750.000	5.750.000	0	
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	32 Paket	32 Paket	Rp163.178.000	Rp163.178.000	0	
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Paket	5 Paket	19.465.000	19.465.000	0	
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.800.000	1.800.000	0	
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94 Laporan	94 Laporan	205.872.000	313.654.000	107.782.000	
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan PD yang terpenuhi	Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan PD yang terpenuhi	100%	100%	0	323.000.000	0	
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	20 Unit	20 Unit	0	75.736.000	75.736.000	

2.18.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pedukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pedukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang diadakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang diadakan	1 Unit	1 Unit	0	247.264.000	247.264.000	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan PD yang terpenuhi	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan PD yang terpenuhi	100%	100%	2.107.518.960	1.745.164.480	-362.354.480	
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	24 Laporan	24 Laporan	901.038.000	901.038.000	0	
2.18.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	72.000.000	72.000.000	0	
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	416 Laporan	416 Laporan	1.134.480.960	772.126.480	-362.354.480	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100%	100%	610.697.000	610.697.000	0	
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 Unit	6 Unit	218.230.000	218.230.000	0	
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	13 Unit	13 Unit	75.570.000	75.570.000	0	

2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	316.897.000	316.897.000	0	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase izin investasi yang ditindaklanjuti	Persentase izin investasi yang ditindaklanjuti	5%	5%	284.530.000	284.530.000	0	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang memperoleh insentif	Persentase pelaku usaha yang memperoleh insentif	8%	8%	284.530,000	284.530.000	0	
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	284.530.000	284,530,000	0	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase kepeminatan investasi	Persentase kepeminatan investasi	95%	95%	339.300.000	339.300.000	0	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan promosi yang dilaksanakan	Persentase kegiatan promosi yang dilaksanakan	64%	64%	339.300.000	339.300.000	0	
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	339.300.000	339,300,000	0	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penyelesaian perizinan sesuai waktu SOP	Persentase penyelesaian perizinan sesuai waktu SOP	90%	90%	166.852.000	166.852.000	0	

2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat ketepatan waktu responsive berjalannya proses perizinan, konsultasi, dan pengaduan	Tingkat ketepatan waktu responsive berjalannya proses perizinan, konsultasi, dan pengaduan	90%	90%	166.852.000	166.852.000	0	
2.18.04.2.01.06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5000 Pelaku Usaha	5000 Pelaku Usaha	1.779.000	1.779.000	0	
2.18.04.2.01.08	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	100 Kegiatan Usaha	100 Kegiatan Usaha	11.000.000	11.000.000	0	
2.18.04.2.01.07	Penyediaan Dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Penyediaan Dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Orang yang memperoleh Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizin	Jumlah Orang yang memperoleh Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizin	240 Orang	240 Orang	154.073.000	154.073.000	0	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Tingkat Kepatuhan perusahaan dalam menyampaikan LKPM	Tingkat Kepatuhan perusahaan dalam menyampaikan LKPM	10%	10%	647.426.316	647.426.316	0	

2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM tepat waktu	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM tepat waktu	10%	10%	647.426.316	647.426.316	0	
2.18.05.2.01.05	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mengikuti Bimbingan Teknis / Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mengikuti Bimbingan Teknis / Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	200 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	591.436.000	591.436.000	0	
2.18.05.2.01.06	Pengawasan Penanaman Modal	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku, dilakukan inspeksi Lapangan serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Informasi Kegiatan Dari Pelaku Usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku, dilakukan inspeksi Lapangan serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	120 Kegiatan Usaha	120 Kegiatan Usaha	Rp23.850.000	55.990.316	0	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan data investasi secara realtime	Persentase ketersediaan data investasi secara realtime	80%	80%	90.500.000	90.500.000	0	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Frekuensi pembaruan data investasi yang disajikan; evaluasi pengembangan sistem	Frekuensi pembaruan data investasi yang disajikan; evaluasi pengembangan sistem	4 Kali	4 Kali	90.500.000	90.500.000	0	
2.18.06.2.01.02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis	3000 Dokumen	3000 Dokumen	90.500.000	90.500.000	0	

Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah Dikaji dan Dimanfaatkan	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah Dikaji dan Dimanfaatkan				
---	--	--	--	--	--	--	--

BAB IV. PENUTUP

4.1. Catatan Penting

Dalam penyusunan rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam terdapat hasil analisis program dan kegiatan telah berjalan dalam kurun waktu semester 1 (satu) merupakan bagian terpenting yang patut menjadi perhatian dalam pelaksanaan program dan kegiatan hingga akhir tahun 2024 semester 2 (dua). Yang menjadi catatan penting bahwa keberhasilan pelaksanaan rencana kerja tidak terpisahkan dari capaian target indicator kinerja pada setiap program dan kegiatan yang telah disusun. Perubahan anggaran gaji dan tpp ASN disebabkan adanya penambahan personal PPPK sebanyak 8 (delapan) personal, kebutuhan PPNS dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPMPTSP berkenaan dengan beban kerja dalam pengawasan perizinan dan penanaman modal (LKPM), kegiatan ini diusulkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya dilakukan pengurangan anggaran gaji THL disebabkan beralihnya status THL ke PPPK dan usulan pengadaan barang dilakukan untuk memenuhi rekomendasi KPK dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Mal Pelayanan Publik.

4.2. Kaidah Pelaksanaan

Usulan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah mengikuti kaidah pelaksanaannya yakni melalui usulan OPD ke Bapelitbang, pembahasan usulan baik di TAPD dan Banggar Dewan, dan dilanjutkan dengan penginputan di aplikasi SIPD RI, hingga seluruh rangkaian mekanisme terlaksana sesuai dengan Permendagri 89/2017 dan Perwako.

4.3. Rencana Tindaklanjut

Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integritas, efektivitas dan efisiesi pelaksanaan pembangunan, setiap pelaksana program dan kegiatan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian serta melaporkan rencana kerja yang telah ditetapkan. Guna memastikan program dan kegiatan yang dilaksanakan mengacu dan memedomani indikator program dan kegiatan serta mencapai target sesuai dengan yang diperjanjikan OPD.

Batam, 12 Juli 2024 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM

DAFY,S.STP,MPA

Prembina/Tingkat I / IVb

NIP 19800619 199912 1 002